

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah perkembangan global yang semakin menekankan pada prinsip keberlanjutan, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik. Konsep lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang baik telah menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja perusahaan, di mana laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berperan sebagai instrumen transparansi untuk mengungkapkan komitmen perusahaan dalam aspek-aspek tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan dan investor yang semakin memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan ini. Mereka menyadari bahwa isu-isu ini dapat berdampak signifikan terhadap keberlanjutan bisnis mereka. Misalnya, perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan operasional mereka dapat menghadapi risiko hukum, reputasi, dan keuangan yang signifikan. Dalam teori legitimasi, kondisi ini disebut dengan ancaman terjadinya *Legitimacy Gap*. Kesenjangan ini terjadi ketika ada ketidakselarasan antara cara perusahaan beroperasi dengan nilai-nilai atau ekspektasi sosial yang ada di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnisnya adalah dengan menyusun *sustainability report*. Laporan ini merupakan sebuah dokumentasi yang memuat informasi mengenai praktik bisnis perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan keberlanjutan di berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi Madona & Khafid (2020).

Penyusunan *sustainability report* memerlukan pemahaman konsep dan standar secara baik. Dalam penerapan standar, perusahaan perlu memahami informasi mana yang perlu disampaikan dalam laporan tersebut. Artinya, tidak semua indikator dalam panduan perlu untuk disampaikan apabila informasi tersebut kurang relevan dengan strategi perusahaan dalam tahun berjalan (Riwayadi, 2019).

Leitoniene dan Sapkauskiene (2015) menyatakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan perlu mempertimbangkan prinsip keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Tujuan pembuatan laporan yang berkualitas untuk mengomunikasikan komitmen, kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada para pemangku kepentingan dengan transparan, terstruktur serta berkualitas. Menurut Rudyanto dan Veronica (2017) permintaan atas laporan keberlanjutan bukan hanya dari luar perusahaan (pemangku kepentingan) namun juga dari dalam perusahaan (*corporate governance*).

Sustainability report bukan semata – mata ringkasan dari laporan tahunan yang merupakan kewajiban pelaporan dari sebuah perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka (Rudyanto dan Veronica 2017). Laporan ini bersifat strategis yang seharusnya mampu memberikan informasi kinerja keberlanjutan baik yang telah dilakukan, sedang dilakukan dan target maupun komitmen upaya menjaga keberlanjutan. Dengan pengertian ini, maka identifikasi risiko strategi untuk menjaga keberlanjutan perusahaan harus dilakukan terlebih dahulu. Perusahaan perlu mengungkapkan informasi ini dalam *sustainability report*, baik bersifat positif maupun negatif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pasal 10 Peraturan ini mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan, baik secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Implementasinya semakin diperkuat dengan terbitnya Surat

Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 yang mewajibkan publikasi laporan keberlanjutan di situs resmi perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi mekanisme internal yang mendorong pengawasan terhadap laporan non-keuangan. Kehadiran komite audit dan komisaris yang independen diharapkan mampu menekan manajemen untuk lebih transparan. Dalam teori stakeholder, komite audit dan komisaris independen bertindak sebagai perwakilan atau instrumen yang melindungi kepentingan para *stakeholder*. Mekanisme GCG, seperti keberadaan komisaris independen dan komite audit, berkontribusi terhadap peningkatan akurasi pengungkapan laporan keberlanjutan (Perbiyanti, 2023). Pratama et al. (2022) menyebutkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang efektif berfungsi sebagai sistem pengawasan yang memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keberlanjutan akurat. Dengan penerapan tata kelola yang baik, perusahaan terdorong untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap tanggung jawab ekonomi, *social*, dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan. Teori stakeholder menekankan bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingannya. Implementasi *corporate governance* yang efektif akan membuat akurasi pengungkapan *sustainability report* sehingga meningkatkan citra perusahaan, dan investor tertarik untuk melakukan investasi.

Corporate governance yang penulis jadikan variabel dari beberapa peneliti terdahulu yaitu komisaris independen, dewan direksi dan komite audit. Pemilihan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit sebagai ukuran *corporate governance* dalam penelitian ini didasarkan pada peran utamanya dalam meningkatkan transparansi dan pengungkapan *sustainability report*. Komisaris independen dipilih karena memastikan pengungkapan akurat dan kredibel, mencegah konflik kepentingan dengan tujuan perusahaan. Direksi diintegrasikan karena mengawasi strategi

perusahaan secara keseluruhan, termasuk alokasi sumber daya untuk pelaporan komprehensif. Komite audit diprioritaskan karena mengevaluasi kontrol internal dan keandalan laporan, berkorelasi positif dengan pengungkapan metrik keberlanjutan. Ketiga variabel ini mewakili mekanisme holistik, mengatasi inkonsistensi literatur pada perusahaan LQ45 dan relevan dengan regulasi OJK. Sofa & Respati (2020) menyebutkan bahwa dewan direksi dan ukuran perusahaan telah berpengaruh positif pada tingkat laporan keberlanjutan. Hal ini menekankan peran direksi dalam mendorong pengungkapan luas untuk meningkatkan akuntabilitas.

Indeks LQ45 merupakan kelompok 45 saham di Bursa Efek Indonesia yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta kondisi finansial dan kepatuhan yang dinilai sangat baik oleh otoritas bursa. Pemilihan indeks ini didasarkan pada argumen bahwa sebagai perusahaan *blue-chip* yang menjadi acuan utama investor, emiten LQ45 menghadapi tekanan publik, regulasi, dan tuntutan transparansi yang jauh lebih masif dibandingkan perusahaan di luar indeks, termasuk dalam pemenuhan standar pengungkapan non-keuangan. Sari & Wijaya (2023) menyebutkan bahwa penggunaan LQ45 sebagai representasi praktik tata kelola terbaik di Indonesia. Terkait keragaman sektor di dalamnya, keberadaan sektor keuangan dan non-keuangan dalam sampel ini justru sengaja dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan generalis mengenai sejauh mana pengungkapan *sustainability report* di Indonesia pada tingkat korporasi tertinggi, di mana variasi karakteristik antarsektor tersebut nantinya akan dimitigasi secara statistik melalui penggunaan variabel kontrol ukuran perusahaan untuk menjaga objektivitas hasil pengujian.

Meskipun penelitian mengenai *sustainability report* sudah banyak dilakukan, namun terdapat inkonsistensi hasil (*research gap*). Beberapa penelitian menyatakan *corporate governance* berpengaruh positif, sementara yang lain menemukan hasil yang tidak signifikan. Dalam Dewi & Ariani dan Kurniawati (2025) menemukan bahwa komisaris independen, dan

komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Ulfa & Harjianti dan Wijayanti (2025) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sementara itu, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Khafid & Mulyaningsih (2012) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan, berperan positif terhadap publikasi *sustainability report*. Sementara, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*. Safitri & Saifudin (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan, dan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Tobing & Zuhrotun & Rusherlistyani (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sementara, komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Aliniar & Wahyuni (2017) menemukan bahwa variabel proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan variabel ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Madona & Khafid (2020) menyatakan bahwa bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan komite audit dan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Susadi & Kholmi (2021) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* mulai dari pengaruh positif signifikan secara simultan hingga tidak adanya pengaruh parsial yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan

tersebut bersifat kontingensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komposisi komisaris independen, struktur direksi, efektivitas komite audit, karakteristik perusahaan, serta konteks regulasi dan ekonomi pada periode pengamatan tertentu, khususnya pada perusahaan terdaftar di indeks LQ45 Indonesia.

Meskipun isu keberlanjutan semakin mendapat perhatian dalam praktik dan regulasi pasar modal, penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan indeks LQ45 masih relatif terbatas, khususnya pada periode 2022–2024 yang merupakan masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Kondisi ini menciptakan celah penelitian karena perusahaan pada indeks LQ45 memiliki karakteristik tata kelola dan skala usaha yang kuat serta menjadi sorotan investor.

Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan menganalisis sejauh mana mekanisme *corporate governance* berperan dalam mendorong pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengidentifikasi keberadaan pengungkapan *sustainability report*, tetapi juga mengukur tingkat pengungkapan berdasarkan indeks yang disusun mengacu pada standar GRI 2016. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek perusahaan LQ45 periode 2022–2024, yang masih terbatas diteliti dalam studi sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024.
2. Pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024.
3. Pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang pengungkapan *sustainability report* di perusahaan dan memberikan literatur terbuka akan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 periode 2022-2024.



2. Bagi pengguna *sustainability report*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan pengungkapan *sustainability report* di perusahaan- perusahaan Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan *corporate governance* yang baik.

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur pada bidang akuntansi dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya terkait, pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini disusun menjadi lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, berisi uraian dengan penjelasan yang bersifat umum, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II berisi landasan serta teori-teori yang mendasari dalam penulisan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Bab III berisi uraian penjelasan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan analisis data. Bab IV berisi deskripsi data, hasil yang akan diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengujian yang digunakan dan pembahasan dari analisa dan pengujian dari hipotesis yang telah dibuat. Dan Bab V berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, saran yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama serta sebagai acuan yang akan dijadikan bahan referensi dan implikasi penelitian.